

LAMPIRAN





Home / News / Megapolitan

Anies: Yang Dimaksud Uang Halal Itu yang Sesuai Aturan

JESSI CARINA

Kompas.com - 03/11/2017, 19:35 WIB



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalamati sukarelawan PMI di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (2/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA)



JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta **Anies Baswedan** menjelaskan apa yang dia maksud dengan uang **halal** dalam pemasukan untuk kas daerah. Menurut Anies, uang yang halal adalah yang diperoleh dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Yang dimaksud halal itu yang sesuai dengan aturan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (3/11/2017).

Anies menyebut uang halal ketika ditanya soal pendapatan yang hilang akibat penutupan Hotel dan Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara beberapa hari lalu. Ketika itu, Anies mengatakan dia tidak ingin pendapatan diterima dari uang haram. Anies ditanya apakah pendapatan dari Alexis haram karena dugaan bisnis prostitusi di dalamnya. Dia bilang itu karena Alexis melanggar aturan.

"Semua yang sifatnya melanggar itu harus ditindak, jadi ini bukan soal uangnya, statusnya apa, kalau pelanggaran dia ditindak. Bahwa dia memberikan manfaat pendapatan dan lain lain itu nomor dua," ujar Anies.

Baca juga : [Pajak Alexis Rp 30 M Per Tahun, Anies Bilang Kami Ingin Uang Halal](#)

Dia tidak ingin pendapatan daerah dijadikan alasan pemerintah membiarkan pelanggaran terjadi. Apalagi, kata dia, pendapatan Alexis juga tidak signifikan dibandingkan pemasukan dari sektor lainnya.

"Kalau itu melanggar peraturan maka itu harus ditindak dan dengan sendirinya revenue tidak kita terima" kata dia.

VIK VISUAL INTERAKTIF KOMPAS vik.kompas.com

DIPLOMASI PARA GAJAH

Ketika para gajah menyelesaikan konflik antara kaumnya dan manusia

Mereka awalnya hidup damai, hingga akhirnya manusia menginvasi "rumah" para gajah. Konflik rebutan ruang tak terelakkan. Kerugian terus dialami kedua pihak. Kini, dengan sentuhan pelatihan yang diberikan, para gajah bisa berdiplomasi mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Jangan ada lagi kekerasan. Simak selengkapnya di vik.kompas.com

KOMPAS KOMPAS.com KOMPAS TV

Temukan inspirasi sudut rumah dimangrupa Anda berdasar lebih mudah dan cepat

Click Here!

IDEA ONLINE

TERPOPULER

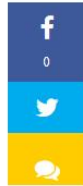
- 1 Saat Jokowi Puji "Pelican Cendekia" Kalla Puji Meli...

Home > News > Nasional

Pajak Alexis Besar, Anies: Nilai Harga Diri Lebih Mahal

Rabu 01 November 2017 14:32 WIB

Rep: Sri Handayani/ Red: Andri Saubani



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada media sesuai apel Mantap Praja Jaya 2017 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/10).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan perpanjangan izin usaha [Hotel dan Griya Sehat Alexis](#) tak hanya terkait dengan besaran pendapatan pajak yang diterima Pemprov DKI Jakarta yang akan hilang. Bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada hal tak ternilai yang dapat diselamatkan.

"Ongkos dari pembiaran itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar daripada uang yang dihitung rupiah. Jauh lebih besar. Kita justru menyelamatkan yang tak ternilai. Apa yang tak ternilai itu? Adalah harga diri, harga nilai sebuah ketertiban," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Ia mengatakan, izin usaha Alexis tidak diperpanjang sebab Pemprov DKI menemukan banyak pelanggaran di tempat itu. Semuanya terekam dalam berbagai laporan masyarakat dan timnya.

Anies juga mempunyai data hotel-hotel lain yang melakukan praktik bisnis serupa. "Kita gunakan akal sehat. Apakah karena pemasukan yang banyak lalu pelanggaran dibiarkan? Mau begitu? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau di negeri ini diatur pakai pemasukan, kita *enggak* punya aturan nanti," kata dia.



PDIP: Yusuf Supend karena Kelelahan

Jumat, 03 Agustus 2018, 09:43



Saat Ra Bersin



Menyini Berbah Masjid



Luhut: Penunc Infrastr



Innalill, Mening



Sohibu Kapan Guru K



In Picture: Aksi Bela Digelar di Bandung

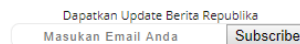
Sabtu, 04 Agustus 2018, 00:15

Sebelumnya, Anies mengingatkan, Pemprov DKI akan menindak tegas hotel-hotel yang melanggar peraturan seperti Alexis. Timnya akan bekerja secara diam-diam atau senyap untuk memeriksa semua hotel yang terindikasi satu per satu. "Jadi bagi sekarang yang masih berjalan yang merasa .. siap-siap!" kata dia sehari sebelumnya.

Ia ingin setiap hotel di Jakarta menjalankan bisnis sesuai dengan perizinan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemprov DKI berhak untuk tidak mengeluarkan izin usaha bagi hotel tersebut.

Anies menggarisbawahi bahwa, dirinya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan semua aturan. Ia menjalankan itu dengan seksama, tegas, dan tanpa pandang bulu. Mantan rektor Universitas Paramadina ini juga meminta seluruh jajaran di pemprov DKI untuk melakukan hal serupa. "Jadi untuk semua yang memiliki kegiatan yang melanggar ketentuan, hentikan kegiatan anda. Kami akan bertindak tegas," kata dia.

Kendati dituduh sebagai tempat penyedia praktik prostitusi, Alexis belum berencana membawa kasusnya ke ranah hukum. Alexis hanya berharap Pemprov DKI Jakarta kembali mempertimbangkan kebijakannya yang tidak menerbitkan izin usaha Alexis. "Belum, belum ke arah sana (melaporkan)," ujar [Staf Legal dan Jubir Alexis Group, Lina](#) saat dihubungi *Republika.co.id* di Jakarta, Selasa (31/10).





Home / News / Megapolitan

Nasib Raperda Reklamasi di Tangan Anies

JESSI CARINA

Kompas.com - 06/12/2017, 07:53 WIB



Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. (Kompas.com/Alsadad Rudi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada catatan panjang terkait proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Sebuah raperda yang menjadi momok bahkan membuat salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016.

Sejak kasus penangkapan itu, pembahasan raperda tata ruang dihentikan sementara. Begitu juga nasib pembahasan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sampai saat ini, kedua raperda itu tidak pernah dibahas kembali.

Pemerintahan pun berganti. Kini Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI. Kebijakannya terkait **reklamasi** sudah disampaikan sejak masa kampanye. Raperda itu pun tak luput dari perhatian Anies.

Anies menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat pada 22 November 2017. Pada saat pembacaan daftar prolegda DPRD DKI tahun 2018, Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak masuk. Artinya tidak akan ada jadwal pembahasan raperda tata ruang pada tahun 2018. Surat tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga : [Ingin Revisi Raperda Tata Ruang, Anies Tarik Surat yang Dikirim Djarot](#)

Dinamika raperda

Kenapa raperda ini menjadi momok? Karena ada satu pasal yang mengatur kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda itu. Dulu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendorong hal itu karena Pemprov DKI bisa mendapat keuntungan besar.

Sementara itu, DPRD DKI berpendapat kontribusi tambahan 15 persen memberatkan pengembang. Selain itu, DPRD DKI berpendapat aturan mengenai besaran kontribusi diatur dalam pergub bukan perda.

Raperda itu dihentikan pembahasannya setelah Sanusi ditangkap dan pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan. Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta meminta untuk melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu.

Surat yang dikirimkan melampirkan surat dari pemerintah pusat tentang pencabutan moratorium reklamasi.

"Kami sudah memenuhi secara prosedural, kami sudah mengajukan, bolanya sekarang di Dewan, apakah akan dibamuskan untuk diagendakan, silakan. Saya rasa tinggal satu ayat saja yang diperdebatkan," ujar Djarot ketika itu.

Baca juga : [Djarot : Bola Kelanjutan Raperda Reklamasi Sekarang Ada di DPRD](#)

Grammar Checker

Correct all grammar errors and enhance your writing



TERPOPULER

1	Saat Jokowi Puji "Pelican Crossing", Kalla Puji Kali Item yang Tak Lagi Bau... Dibaca 10.923 kali
2	Menyusuri Kali Sentiong: Melihat Aliran Air Jernih, Keruh, hingga Menghitam... Dibaca 8.766 kali
3	Penjelasan STAN soal Syarat Minimal Usia Calon Mahasiswa Dibaca 8.693 kali
4	Kapolri Diminta Hentikan Penyidikan Kasus Video Porno dengan Tersangka Luna Maya Dibaca 8.492 kali
5	Bertambah, 70 Sekolah di Jakarta Akan Diliburkan Selama Asian Games Dibaca 8.130 kali

Dalam surat yang dikirim Pemprov DKI Jakarta, Djarot mencantumkan syarat agar pasal tambahan kontribusi 15 persen tetap dimasukkan dalam perda. Dia bersikukuh mengenai pasal itu.

Djarot mengirim surat pada 6 Oktober, hanya beberapa hari sebelum dirinya melepas masa jabatan sebagai gubernur. Namun kini surat yang dikirim Djarot ditarik Anies. Pembahasan raperda ini semakin mundur.

Perda tentang tata ruang itu akan mengatur tata ruang di pesisir utara Jakarta termasuk **pulau reklamasi**. Pengaturan harus dilakukan agar pulau hasil reklamasi tidak seluruhnya dikuasai pengembang pulau-pulau itu.

Perda tata ruang itu nantinya akan mengatur bagian-bagian yang dikuasai pengembang, yang diperuntukan buat masyarakat, kantor-kantor pemerintahan, dan lainnya.

Ingin direvisi

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengkaji ulang raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Hal itu menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memasukkan raperda yang berkaitan dengan reklamasi pulau di Teluk Jakarta tersebut ke dalam program legislasi daerah (prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD DKI pada 2018.

"Kami tarik untuk sementara. Kami tarik dulu untuk di-review Pak Gubernur," ujar Yayan.

Anies belum mau menjawab bagian apa yang akan dia tinjau ulang. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno malah belum mengetahui alasan raperda itu ditarik.

Namun secara pribadi, Sandiaga berharap revisi perdanya dilakukan untuk memastikan penciptaan lapangan pekerjaan di pulau reklamasi.

"Karena saya punya pemikiran, ingin juga dilihat dari segi penciptaan lapangan kerja. Kami ingin betul-betul bahwa raperda itu bisa memastikan lapangan kerja tercipta," ujar Sandiaga.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, penundaan pembahasan raperda itu akan berdampak pada masalah perizinan.

Salah satu perizinan yang dimaksud Gamal yakni izin mendirikan bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menerbitkan IMB sebelum aturan tata ruang di pantai utara Jakarta itu disahkan.

"IMB kan untuk izin bangunan. Nah, bangunan yang boleh ada itu apa kan tergantung oleh perdanya tata ruang," kata Gamal.



Kasus reklamasi Teluk Jakarta kini masuk dalam penyidikan di Polda Metro Jaya, polisi menilai perkara ini...



NOW TRENDING



Gerindra: Kubu Prabowo Cepat Bahas Pilpres, Koalisi Jokowi Alami Pelambatan



Jokowi: Jangan Sampai Tak Masuk 10 Besar di Asian Games, Taruh di Mana Muka Kita



Sabtu Malam, Rekonstruksi di Tol Jakarta-Cikampek Dimulai



Peneliti Pecahkan Misteri Pembuat Stonehenge



Home > News > Nasional

Anies Akhirmya Cabut Raperda Reklamasi yang Diajukan Djarot

Sabtu 16 Desember 2017 06:45 WIB

Rep: Mas Alamli Huda/ Red: Elba Damhuri

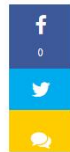


Foto udara kondisi perairan di sekitar wilayah reklamasi di Teluk Jakarta

Foto: Republika

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Pencabutan ini memastikan tak ada pembahasan raperda terkait reklamasi pada 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

"Dengan dicabutnya perda ini maka tidak ada pembahasan di tahun 2018," kata Anies di Balai Kota DKI, Jumat (15/12).

Dua raperda yang ditarik itu, yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura). Dua raperda ini diajukan mantan gubernur Djarot Saiful Hidayat pada akhir masa jabatannya.

Anies mengatakan, akan melakukan pengkajian ulang terhadap seluruh isi raperda tersebut. Semua aturan di raperda yang tidak sesuai dengan janjinya akan dirombak.

Dia akan membentuk tim untuk memastikan isi raperda tersebut sesuai dengan janji kampanyenya. "Kita akan pastikan sesuai dengan janji kita bahwa kita akan memanfaatkan seluruh wilayah pantai Jakarta untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum," ujar dia.

Tim yang dibentuk akan merancang penataan secara konseptual dengan memperhatikan faktor sosiologis faktor ekonomis, faktor geografis juga faktor strategis global, katanya. "Jakarta adalah Ibu Kota yang sangat strategis sehingga apapun yang kita lakukan di pesisir pantai itu akan punya efek pada keamanan nasional, akan punya efek kepada stabilitas ekonomi, stabilitas politik," kata Anies.

Jadwal Shalat

Saturday, 04 Aug 2018 14:22:05

JAKARTA

ASHAR

15:26

EMBED iframe src="http://www.republika.co.id/jadwal-sh" data-bbox="701 297 874 300"/>

TERPOPULER



PDIP: Yusuf Supendi Meninggal karena Kelelahan

Jumat, 03 Agustus 2018, 09:43 WIB



Saat Rasulullah SAW Bersin



Menyimak Khutbah Berbahasa Indonesia di Masjid Al-Haram



Luhut: Tidak Perlu Ada Penundaan Proyek Infrastruktur



Innalillahi, Yusuf Supendi Meninggal Dunia



Sohibul Iman: Sampai Kapan Pun, Yusuf Supendi Guru Kami

IN PICTURES



In Picture: Aksi Bela Al-Aqsha Digelar di Bandung

Sabtu, 04 Agustus 2018, 00:15 WIB

REPUBLICA TV



Hasil analisis tim tersebut nantinya yang akan diterjemahkan dalam perda baru terkait reklamasi Teluk Jakarta. Ia menjanjikan, semua konsekuensi pencabutan raperda ini akan dibuat landasan hukumnya.

Kedua aturan yang pembahasannya dicabut Anies merupakan payung hukum untuk melakukan pembangunan di 17 pulau reklamasi. Sejauh ini, pulau yang telah dimulai pembangunannya dan telah berwujud daratan baru adalah Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Pulau C dan D dikerjakan oleh PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan PT Agung Sedayu Group) dengan izin pelaksanaan yang diterbitkan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Sedangkan Pulau G dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land) dengan izin yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Pada 2014, Gubernur Basuki juga menerbitkan izin pelaksanaan untuk pulau F, H, I, dan K. Pengembang untuk pulau-pulau itu adalah PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, serta kemitraan PT Jaladri Kartika dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Pemerintah pusat telah mencabut sanksi administratif atas pembangunan Pulau C dan D yang sebelumnya dinilai Kementerian Kemaritiman melanggar sejumlah regulasi termasuk belum adanya perda zonasi. Kendati demikian, Gubernur Anies berkeras menjalankan janjinya semasa kampanye menghentikan reklamasi jika semata untuk kepentingan swasta.

Beberapa waktu lalu, Anies menyebut Pemprov DKI akan menempuh langkah hukum terhadap Pulau C dan D di Teluk Jakarta. Pulau hasil reklamasi itu berpolemik dan sempat dihentikan pembangunannya lantaran tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini tak mengungkap lebih detail langkah hukum yang dimaksudnya. Anies hanya menekankan, penataan kawasan di utara Jakarta perlu dipikirkan untuk jangka panjang terkait kebutuhan Ibu Kota saat ini dan masa depan.

Terkait pencabutan kemarin, Anies mengatakan areal pantai di Jakarta Utara harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik semaksimal mungkin. Selain itu, Anies juga menyingung penderitaan warga pesisir Jakarta yang terdampak proyek reklamasi. Di antaranya, banjir rob yang kian tinggi, serta para nelayan yang tercerabut penghidupannya.

"Itu sebabnya, raperda yang akan kami susun adalah raperda yang harus memihak kepada mereka yang hari ini justru tersingkirkan," kata Anies.

Toyota Siap Bangun Ekosistem Mobil Elektrifikasi

Sabtu, 04 Agustus 2018, 09:04 WIB



'Jokowi Memang Sederhana Bukan Pencitraan'



Kebakaran Gili Lawa Diduga Karena Puntung Rokok



Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mempersilakan Anies Baswedan merombak total dua raperda terkait reklamasi. Namun, ia mengatakan, DPRD juga berhak merombaknya juga ketika draf raperda masuk ke dewan.

"Sekarang apa mau gubernur silakan saja. Tapi begitu masuk ke Bapemperda itu urusan kami. Nanti dirombak lagi di DPRD," kata dia.

Bestari mengatakan, eksekutif dan legislatif punya wewenang masing-masing dalam penyusunan perda. Ketua Fraksi Nasdem itu menilai, pencabutan dua raperda oleh gubernur tak berarti membatalkan reklamasi.

Dia berpendapat reklamasi harus dilaksanakan sesuai aturan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Pemerintah daerah, menurut dia, harus mengikuti aturan dari pusat.

"Pemda bagian dari pemerintah pusat. Maka tidak bisa seenak-enaknya serta merta membatalkan yang sudah digariskan (pemerintah pusat)," katanya.

Bestari menambahkan, Anies bisa kapan saja mengajukan draf dua raperda terkait reklamasi yang setelah selesai direvisi oleh timnya. Setelah itu, menurut dia, 'bola' sepenuhnya di tangan dewan. *(Pengolah: Fitriyan zamzami).*

Komentar 0



Dapatkan Update Berita Republika

Masukan Email Anda

Subscribe

reklamasi jakarta

anies cabut raperda

tak ada reklamasi

